

Judul : Pimpin dewan HAM PBB, Indonesia perkuat diplomasi global
Tanggal : Jumat, 09 Januari 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pimpin Dewan HAM PBB

Indonesia Perkuat Diplomasi Global

SENAYAN menyambut positif terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk tahun 2026. Penetapan itu dilakukan dalam Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, Kamis (8/1/2026).

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya menilai, jabatan tersebut merupakan peluang strategis bagi Indonesia untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinannya di tingkat global. Indonesia harus mampu memimpin Dewan HAM PBB secara efektif dan sesuai dengan cita-cita awal pembentukannya.

Willy menekankan, di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dan berbagai krisis kemanusiaan global, kepemimpinan yang strategis sangat dibutuhkan. Indonesia diharapkan mampu memilih isu-isu prioritas yang relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat internasional.

"Dalam situasi dunia yang penuh ketegangan, Dewan HAM PBB perlu dipimpin secara stra-

tegis oleh Indonesia," ujarnya.

Indonesia diketahui ditetapkan sebagai nominee Presiden Dewan HAM PBB setelah meraih 34 dari 47 suara negara anggota Asia-Pacific Group (APG) dalam pemungutan suara pada 23 Desember 2025. Thailand memperoleh 7 suara, sementara empat negara abstain dan dua suara dinyatakan tidak sah.

Menurut Willy, kepemimpinan Indonesia akan menjadi ujian kualitas diplomasi sekaligus konsistensi penegakan HAM di dalam negeri. Di saat banyak lembaga internasional pasca Perang Dunia II dinilai kehilangan ketajamannya, harapan dunia terhadap peran Indonesia pun semakin besar.

Ia menegaskan, posisi tersebut juga menghadirkan tantangan internal. Indonesia harus menunjukkan komitmen nyata dalam promosi, perlindungan, dan pemenuhan HAM di dalam negeri. Hal itu menjadi pekerjaan rumah besar, khususnya bagi Kementerian HAM.

"Komisi XIII DPR akan terus



Willy Aditya

mengawal dan membersamai Kementerian HAM serta lembaga HAM agar kualitas penegakan HAM nasional semakin baik," katanya.

Anggota Komisi XIII DPR Mafirion menilai, terpilihnya Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB merupakan pengakuan dunia internasional sekaligus momentum percepatan reformasi penegakan HAM nasional. Jabatan tersebut bukan sekadar prestise, melainkan

tanggung jawab besar untuk

memimpin dengan keteladanan dan prinsip keadilan global.

"Kepercayaan ini akan memperkuat posisi tawar diplomatik Indonesia di berbagai forum internasional," ujar Mafirion.

Ia bilang, sebagai representasi Global South, Indonesia memiliki ruang lebih luas untuk mengangkat isu-isu HAM dari perspektif negara berkembang, seperti hak atas pembangunan, keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, serta dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan.

Mafirion juga menilai kepemimpinan ini akan meningkatkan citra dan kredibilitas Indonesia sebagai negara yang menjunjung demokrasi, perdamaian, dan HAM. Selain itu, posisi tersebut dapat mendorong reformasi HAM di dalam negeri melalui peningkatan standar dan perhatian internasional.

Kepemimpinan Indonesia di Dewan HAM PBB dinilai akan memperkuat peran Indonesia di kawasan ASEAN, khususnya dalam isu HAM dan kema-

nusiaan. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya kepercayaan global terhadap stabilitas hukum dan politik nasional, yang berpotensi menciptakan iklim investasi dan ekonomi yang lebih kondusif.

Sementara itu, Direktur HAM dan Migrasi Kementerian Luar Negeri Indah Nuria Savitri memastikan, Indonesia akan memimpin Dewan HAM PBB secara imparial, objektif, dan transparan. Pemerintah juga berkomitmen menjalankan pendekatan inklusif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

"Kepercayaan ini merupakan hasil kerja diplomasi panjang yang dipimpin oleh Kementerian Luar Negeri bersama seluruh pihak terkait," ujar Indah.

Ia menambahkan, posisi Presiden Dewan HAM PBB akan dijabat oleh Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa sekaligus Duta Besar Sidharto Reza Suryodipuro, yang penetapannya dilakukan di Jenewa pada Kamis (8/1/2026). ■ TIF